

DOI: 10.15642/acce.v3i

REPOSISI PERAN UNIVERSITAS DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI: PERSPEKTIF QUADRUPLE HELIX

Anugerah Yuka Asmara

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

E-mail: a.yuka.asmara@gmail.com

Dhian Kusumawardhani

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Email: dhiankusuma@gmail.com

Emi Hidayati

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng - Banyuwangi

Email: emi.iaibrahimy.gtg@gmail.com

Abstract: *University has been main leverage to economics development in developed countries which is called as knowledge-based economy (KBE). In turn, developing countries are pursued to catch up develop countries through KBE. In Indonesia case, university carries up slogan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” and entrepreneurial university. Consequently, university conducts all research and development (R&D) line from upstream (basic research) to downstream (R&D commercialization). It leads to university as the central position among business, government, and communities. This study uses quadruple helix concept by which university, business, government, and communities should have balanced role to make university’s role real, especially related to strengthening economics of rural people. Qualitative approach is used as research method to this study with optimizing data secondary sources. This study finding is that it is required reposition of university in doing its role among business, government, and society. It aims to clear university’s role and to show up its contribution to strengthen economics of society in rural areas.*

Keywords: *Role, University, Economics, Society, Quadruple Helix*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peran universitas telah diakui sebagai elemen pengungkit perekonomian wilayah (García-González & Ramírez-Montoya, 2019), bahkan juga menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong perekonomian nasional di berbagai negara. Praktik di berbagai negara maju yang tergabung di dalam organization for economic co-operation and development (OECD) countries seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang telah



membuktikan bahwa universitas telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi di negara-negara tersebut (OECD, 2008; OECD, 2011). Bahkan negara-negara sedang berkembang pun diminta untuk melakukan inovasi agar bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju (OECD, 2008).

Inovasi merupakan perwujudan nyata ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang ada di masyarakat. Kuhlmann et al (2010) & Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa inovasi perlu didorong keberadaan iptek sebagai entitas dasar yang tidak terpisahkan dari sistem inovasi di suatu negara. Dodgson (2000) menambahkan bahwasanya peran universitas dalam menghasilkan keluaran-keluaran atau produk iptek perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan juga industri. Xu et al. (2018) menyebutkan bahwasanya inovasi tidak akan terjadi hanya dengan menghasilkan produk iptek semata, yang itu hanya bersifat publikasi, prototipe, paten, dan bentuk keluaran ilmiah lainnya, namun juga bagaimana agar publikasi, prototipe, atau paten dari suatu produk tersebut dapat digunakan oleh konsumen atau bisa dikomersialisasikan.

Penjelasan di atas menguatkan bahwa peran universitas menjadi sentral di dalam mendukung pengembangan inovasi kaitannya dengan bagaimana iptek dihasilkan. Di Indonesia, peran perguruan tinggi atau universitas dituntut untuk menghasilkan inovasi, bahkan beberapa bentuk perguruan tinggi di Indonesia ialah mengarah pada *entrepreneurial university* dengan menekankan pada ekonomi berbasis pengetahuan (Sakapurnama & Huseini, 2019; FIA-UI, 2020). Artinya, universitas tidak hanya terbatas melakukan aktivitas-aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang), melainkan juga menghasilkan manfaat ekonomi dari aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini berdampak pada status kelembagaan perguruan tinggi yang tidak hanya sebagai penyedia iptek, melainkan juga sebagai penghasil sumber ekonomi.

Guna merespon *entrepreneurial university*, bagi perguruan tinggi negeri (PTN), status sebagian universitas kemudian diubah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) dengan status otonom (FIA-UI, 2020), sementara bagi perguruan tinggi swasta (PTS), ada upaya untuk merombak kurikulum agar dunia akademis lebih dekat ke praktik kewirausahaan (Dikti, 2021). Melalui program ini, setiap perguruan tinggi memaksimalkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal guna mendukung ekonomi berbasis pengetahuan. Menurut Sakapurnama et al. (2020), dukungan eksternal seperti regulasi dan konteks lingkungan diperlukan dalam mengoptimalkan sumber daya internal universitas.

Universitas yang melakukan perubahan orientasi dari universitas berbasis pendidikan, kemudian menjadi berbasis riset, dan saat ini berbasis wirausaha, maka sebaiknya tidak mengesampingkan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga pendidikan (Kuntadi, tanpa tahun). Saat ini, peran universitas semakin luas yang tidak hanya dituntut untuk melakukan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aktivitas pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun juga bagaimana agar hasil-hasil pendidikan dan litbang dapat bermanfaat ke masyarakat, dan tentunya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi (Bastalich, 2010).

Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga *entrepreneurial university*, tentu universitas tidak bisa melakukan sendiri. Apa yang dilakukan oleh universitas tentu berdampak pada pihak-pihak lain seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Bahkan keterlibatan ketiga pihak tersebut tidak terbatas hanya sebagai penerima dari aktivitas-aktivitas universitas, melainkan sebagai mitra dalam menginisiasi dan menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini yang kemudian memunculkan konsep *quadruple helix*, atau konsep jejaring ABGC yang merupakan akronim dari *academician, business, government, and community*.

Jejaring ini menunjukkan bahwasanya aktor-aktor dari universitas, pemerintah, industri, dan juga masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Kolehmainen et al., 2016).

Jejaring ABGC dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perguruan tinggi dalam menjalankan aktivitas tri dharma perguruan tinggi dan juga *entrepreneurial university* dalam kondisi pasca pandemic covid-19 seperti saat ini. Sejak virus covid-19 merebak di awal bulan Maret 2022 silam, pertumbuhan ekonomi nasional sempat mengalami guncangan cukup signifikan hingga -5,32% (Junaedi & Salitis, 2020) dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha formal, termasuk mereka yang memiliki keahlian dan pendidikan tinggi pun bisa terpaksa keluar dari pekerjaan dan bekerja di sektor informal seperti pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Rahman dkk, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada perkiraan peningkatan jumlah pelaku UMKM sebanyak 2,55% di awal pandemik covid-19 (Adawiyah, 2022). Bahkan, sejak ada pandemi, dari total 64,19 juta UMKM yang ada saat ini, sebagian besar (82,9%) terdampak negatif, dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang justru tumbuh dengan adanya pandemi ini (Limanseto, 2021).

Di desa, para pelaku UMKM pun terdampak negatif, baik karena omset usahanya yang menurun akibat sepi nya pembeli, maupun tidak ada pergerakan ekonomi dari kota dan desa serta sebaliknya (Maleha dkk, 2021). Begitu pula dengan mereka yang bergerak di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), mengalami stagnasi pertumbuhan. Apa yang sedang terjadi di desa di Indonesia saat ini merupakan peluang bagi universitas untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Peran universitas sebagai tri dharma perguruan tinggi dan *entrepreneurial university* dapat menjadi sarana untuk mendekatkan teori yang dibangun di dunia akademis menjadi praktik nyata di dunia empiris.

Rumusan Masalah

Peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui tri dharma perguruan tinggi dan *entrepreneurial university* tentu melibatkan masyarakat dan universitas sebagai pelaku utama. Kita ketahui bahwasanya, amanat yang diemban oleh universitas saat ini sangat besar, terlebih lagi harus mengaplikasikannya ke masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan bisnis sangat diperlukan mengingat kedua pihak tersebut seringkali menjadi penentu kunci di dunia empiris terkait dengan penguatan ekonomi di suatu wilayah. Karena itu, perspektif *quadruple helix* digunakan sebagai kerangka studi terkait posisi universitas di dalam jejaring tersebut. Berdasar rumusan masalah di atas, studi ini mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa saat ini?
2. Bagaimana posisi universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam perspektif *quadruple helix* ?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa saat ini.
2. Menganalisis posisi universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam perspektif *quadruple helix*.



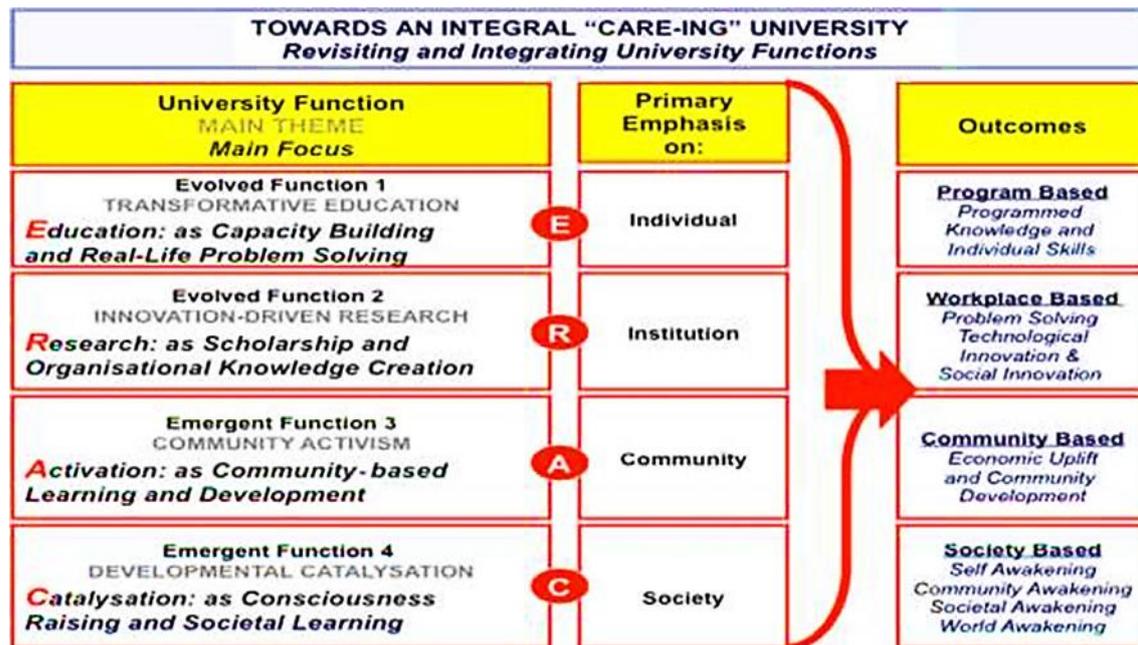
TINJAUAN KONSEPTUAL

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma Perguruan Tinggi telah menjadi ruh dari perguruan tinggi itu sendiri. Ada 3 (tiga) aktivitas utama yang sudah menjadi kewajiban dari perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bahasan ini, aspek pengabdian masyarakat kami pertukarkan istilahnya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses menciptakan masyarakat dengan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya. Proses tersebut menuntut sarana organisasi untuk berkembang (Badaruddin, 2020). Pemberdayaan masyarakat di sini dimaknai sebagai suatu upaya atau cara dimana orang, organisasi, dan masyarakat diarahkan untuk dapat menguasai kehidupannya (Damsar & Indrayani, 2016). Praktik pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan perubahan yang dilakukan dari dalam diri individu, komunitas, atau organisasi tetapi juga memerlukan dukungan dan dorongan dari pihak luar, terutama dukungan dari lembaga-lembaga yang berperan dalam praktik pemberdayaan. Salah satu dari sekian banyak institusi yang berperan dalam pelaksanaan praktik pemberdayaan masyarakat adalah perguruan tinggi (Saleh & Mujahiddin, 2020).

Pentingnya peran perguruan tinggi dalam praktik pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan Schieffer & Ronnie (2014) yang dikutip oleh Saleh & Mujahiddin (2020) melalui konsep yang mereka sebut *The Integral University*, sebuah pendekatan yang menginginkan perubahan pada sebuah perguruan tinggi menjadi lebih integral (baca; terintegrasi) dengan menghubungkan empat fungsi perguruan tinggi besar yaitu; Pendidikan (E), Penelitian (R), Aktivasi Komunitas (A), dan Pengembangan Katalis (C) [26]. Penggabungan empat fungsi utama Universitas dilakukan agar Universitas menjadi “peduli” bagi pengembangan individu, organisasi, dan komunitas. Dalam proses empat utama fungsi universitas disatukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan keempat fungsi tersebut berdasarkan bidang tugasnya masing-masing.

Selain itu, fungsi pendidikan dan penelitian harus melampaui fokus utamanya dengan berevolusi dimana pendidikan harus lebih diselaraskan dengan pendekatan transformatif yang dapat menjawab permasalahan kontemporer dalam dinamika pembelajaran. Padahal penelitian harus lebih diselaraskan dengan inovasi. Oleh karena itu terdapat dua fungsi untuk melaksanakan bentuk pembelajaran dan penelitian berbasis komunitas dan masyarakat (Schieffer & Ronnie, 2014).



Gambar 1. Menuju Universitas CARE-ing Integral

Sumber: [Schieffer & Ronnie \(2014\)](#)

Saat ini peran universitas ditujukan untuk *catalyztion of development, activism of community, research to innovation, and education to be transformative (CARE)*. Sebagaimana konsep tri dharma perguruan tinggi yang mengharuskan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, universitas juga diminta untuk mempercepat proses tri dharma perguruan tinggi tersebut. Karena itu, universitas juga harus bisa memenuhi tujuan untuk individu, kelembagaan, komunitas, dan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, tidak hanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun juga percepatan keetrbukaan masyarakat akan perubahan sosial global yang ada.

Entrepreneurial University

Istilah *entrepreneurial university* atau universitas wirausaha telah mengalami perluasan makna yang pada awalnya dipahami bahwa universitas milik pemerintah yang memiliki jiwa kewirausahaan dengan melakukan aktivitas-aktivitas internal secara mandiri tanpa harus bergantung banyak kepada pemerintah sebagai bentuk pembiayaannya. Universitas dituntut dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas di dalam kampus tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai lembaga pendidikan ([Kuntadi, tanpa tahun](#)). Saat ini, *entrepreneurial university* juga dipahami sebagai upaya dari universitas untuk dapat mendatangkan sumber pendapatan ekonomi melalui aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya yang meliputi komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang). Tentunya hal ini tidak lepas dari adanya konsep ekonomi berbasis pengetahuan atau *knowledge-based economy (KBE)* ([Sakapurnama et al., 2019](#)).

KBE telah menjadikan universitas menjadi aktor utama dalam mendorong daya saing ekonomi suatu negara berbasis inovasi. Berbagai aktivitas telah dilakukan di internal universitas seperti aktivitas litbang, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), konsultasi dengan pakar, serta upaya-upaya kreatif dan inovatif lainnya. Bahkan universitas dituntut untuk bekerjasama dengan sektor industri dan sektor-sektor pembiayaan lainnya untuk mendukung upaya ini ([Sakapurnama et al., 2019](#)). Aktivitas ini telah mengarahkan universitas untuk juga



terlibat dalam menghasilkan inovasi (Sakapurnama et al., 2020). Dalam hal ini, inovasi diartikan sebagai upaya untuk mengkomersialisasikan aktivitas-aktivitas litbang yang dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga litbang. Artinya, hasil litbang tersebut harus bisa digunakan oleh pengguna dan memiliki nilai tambah secara ekonomi dan/atau sosial (Dodgson, 2000; Xu et al., 2018).

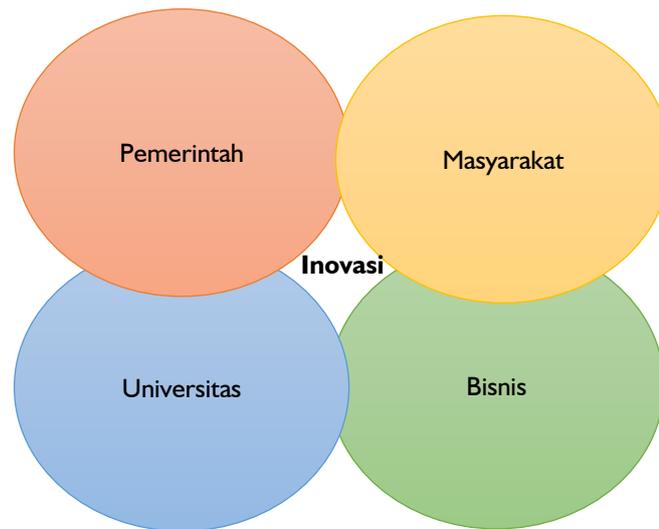
Ada 5 (lima) dimensi yang menjadikan sebuah universitas dapat dikatakan memiliki *entrepreneurial university*, yaitu strategi dan tata kelola, kapabilitas sumber daya manusia, penerapan tri dharma perguruan tinggi, faktor-faktor pengungkit dan pendorong, serta jaringan (Sakapurnama et al., 2020). Artinya, konsep tri dharma perguruan tinggi sudah menjadi bagian melekat di dalam konsep *entrepreneurial university*. Perluasan makna *entrepreneurial university* sebagaimana dijelaskan di atas digunakan sebagai landasan teori di dalam studi ini. Artinya, universitas saat ini sudah bergerak lebih jauh tidak sebatas hanya melakukan tri dharma perguruan tinggi semata, namun juga harus bisa mengubah aktivitas-aktivitas litbangnya menjadi produk-produk komersial.

Secara detail, konsep *entrepreneurial university* ditujukan untuk mendorong komersialisasi hasil akademik melalui aplikasi paten, lisensi keluar, dan pendirian perusahaan baru (Perkmann & Walsh, 2007). Jonsson et al. (2015) dalam Yun & Liu et al. (2019) mengatakan bahwa Universitas dapat bertindak sebagai perantara, menyatukan produsen dan pengguna pengetahuan, yang menciptakan kepercayaan dan hubungan yang berkomitmen. Studi eksplorasi juga mengungkap peran baru universitas sebagai perantara tepercaya atau pusat inovasi terbuka (Striukova, L. & Rayna, 2015).

Quadruple Helix

Asal usul konsep *quadruple helix* dimulai dari konsep *triple helix*, merupakan pengembangan konsep sebagai bentuk respon intelektual terhadap ekonomi berbasis pengetahuan atau *knowledge-based economy (KBE)* yang muncul pada 1990-an. Model *quadruple helix* diusulkan untuk mengkonsep ulang masyarakat di abad kedua puluh. Menurut Carayannis dan Campbell (2012) sebagaimana dinyatakan dalam Cai & Lattu (2022), yang dianggap sebagai pendiri model, ingin 'mengembangkan pandangan dan visi yang lebih berorientasi masa depan, mengatasi tantangan saat ini dan memperkenalkan pemecahan masalah. yang tertarik pada solusi berkelanjutan, menekankan perspektif pembangunan berkelanjutan yang menyatukan inovasi, kewirausahaan, dan demokrasi'.

Konsep *quadruple helix* dengan mengedepankan jejaring aktor-aktor *academician, business, government, and community (ABGC)* muncul atas desakan dari kekurangan dari konsep *triple helix* seperti *academician, business, and government (ABG)*. Para pendukung model *quadruple helix* mengkritik *triple helix* karena mengesampingkan masyarakat sipil dari fokus analisisnya. Seperti yang dikatakan Zheng (2010) dalam Cai & Lattu (2022), dibandingkan dengan pendekatan lain untuk studi inovasi, termasuk *quadruple helix*, 'model *triple helix* mengurangi kompleksitas dinamika yang dimainkan dalam sistem inovasi pengetahuan ekonomi'. Pengurangan kompleksitas seperti itu memungkinkan dinamika esensial menjadi lebih jelas terlihat. Model *quadruple helix* diterapkan untuk mempelajari peran organisasi non-profit dalam sistem inovasi (Arranz, 2020).



Gambar 2. Quadruple Helix

Sumber: Nordberg et al. (2020) dengan penyesuaian

Model *quadruple helix* dengan menambahkan heliks keempat, yang didefinisikan sebagai 'publik dan masyarakat sipil berbasis media dan budaya'. Heliks keempat menggambarkan bahwa dalam masyarakat dan ekonomi pengetahuan modern, selain dari akademisi, industri dan pemerintah, pengetahuan mengalir ke semua bidang masyarakat dan ekosistem inovasi Cai & Lattu (2022). Ada 4 (empat) tipe model QH sebagai tipe ideal. Tipe pertama memperluas model TH tradisional melalui pemanfaatan informasi pengguna. Tipe kedua adalah lab hidup yang berpusat pada perusahaan, di mana pengguna diperlakukan baik sebagai informan maupun sebagai pengembang. Yang ketiga adalah laboratorium hidup yang berpusat pada organisasi publik, yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi publik sehingga mereka dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih baik kepada warga. Pada tipe keempat, warga berada di kursi pengemudi, dan mereka memutuskan inovasi seperti apa yang dibutuhkan dan dikembangkan. Peran perusahaan, organisasi publik dan Universitas adalah untuk mendukung warga dalam kegiatan inovasi mereka (Arnkil et al., 2010; Nordberg et al., 2020).

Masyarakat dan Ekonomi Pedesaan

Pada awalnya, desa di Indonesia dicirikan sebagai wilayah dimana masyarakat lokal tinggal dengan karakteristik bahasa lokal yang intens, level pendidikan relatif rendah, sangat tergantung pada sumber daya alam (pertanian/perikanan/perkebunan/kehutanan) sebagai mata pencarian utama. Namun saat ini, desa dimaknai lebih luas, merupakan wilayah dengan otoritas paling rendah di struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa. Bahkan, beberapa kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat desa ditentukan di level ini (Alamsyah, 2011).

Perkembangan desa untuk mensejahterakan kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya telah mendorong berbagai aktivitas produksi di wilayah tersebut. Desa dituntut tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan. Namun juga kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat local (Gilaninia, 2015). Masyarakat desa dituntut oleh pemerintah untuk menjadi sumber daya terampil dan ahli dalam kaitannya dengan aspek wirausaha di desa (Wu, 2003). Karena itulah pertumbuhan unit-unit usaha di desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat desa mandiri secara ekonomi.



Sejak dikeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diharapkan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) guna mendorong aktivitas-aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Tidak hanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sebagian besar hadir secara informal di desa, keberadaan BUMDesa bisa dikatakan bagian dari UMKM tersebut dengan struktur organisasi formal yang dibentuk berdasarkan UU 6/2014. [Kusumastuti & Asmara \(2018\)](#) menyatakan bahwa BUMDesa sebagai sarana bagi masyarakat desa untuk melakukan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui BUMDesa, diharapkan akan lahir berbagai inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat lokal bersama pemerintah desa setempat, dan bermanfaat minimal bagi masyarakat desa itu sendiri.

Di bawah ini disajikan terkait definisi desa berdasar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yaitu:

- (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3). “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.
- (6) “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.
- (12) “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi secara lebih komprehensif tanpa harus diarahkan oleh elemen-elemen konseptual di awal. Studi kualitatif akan menjawab alasan di balik fenomena yang sedang terjadi di lapangan di waktu tertentu. Menurut Sugiyono (2014) dalam [Adawiyah \(2022\)](#), setiap kejadian, kondisi, ataupun peristiwa merupakan bagian utuh yang dapat memotret fenomena yang terjadi secara empiris. Karena itu, memisahkan antar kejadian, kondisi, ataupun peristiwa tidak dibenarkan dalam jenis penelitian kualitatif karena akan menghilangkan makna dari fenomena itu sendiri. Hal ini sangat sesuai dengan studi ini mengingat, reposisi universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk menemukan kembali model yang sesuai bagi universitas untuk menjalankan

perannya di tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, antar peristiwa, kejadian, kondisi harus menjadi satu kesatuan, tidak menjadi bagian terpisah.

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang diambil dari berbagai buku, jurnal ilmiah, prosiding ilmiah, tesis, dokumen kerja, bahan presentasi ilmiah, berbagai dokumen pemerintah termasuk peraturan undang-undang di dalamnya, serta sumber-sumber terpercaya milik pemerintah dan non pemerintah yang diakses dari website (online). Sumber data tersebut kemudian dikumpulkan dan disortir sesuai dengan kebutuhan dari studi ini. Adapun pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dimulai dari publikasi ilmiah (buku, jurnal, tesis, prosiding), dokumen kerja pemerintah (termasuk aturan), dan sumber online terpercaya. Adapun penyortiran didasarkan atas akses sumber terpercaya, akses sumber ilmiah, tahun publikasi, keakuratan data, kemutakhiran data dan kesesuaian data dengan studi yang dimaksud. Saat ini ada sejumlah 55 literatur yang menjadi rujukan studi ini. Tambahan pula, pengalaman penulis sebagai mahasiswa, dosen dan peneliti, juga menambahkan hasil temuan dan analisis terkait dengan bagaimana praktik-praktik yang sudah dilakukan universitas saat ini dalam kontribusinya kepada penguatan ekonomi masyarakat desa. Karena itu, penulis juga sekaligus menjadi instrumen penelitian dan juga sumber informasi secara langsung.

Studi ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles and Huberman (1994) sebagaimana yang digunakan di sebagian besar studi-studi kualitatif sebelumnya. Ada 4 (empat) tahapan dalam analisis data yaitu, 1) koleksi data, proses dimana semua data dikumpulkan untuk dilihat kesesuaian dengan studi; 2) reduksi data, proses dimana data yang sudah terkumpul kemudian direduksi untuk dipilih sebagai bahan analisis di studi ini; 3) penampilan data, dimana data kemudian ditampilkan sesuai dengan teori yang digunakan dan interpretasi dari peneliti; 4) data kemudian disimpulkan untuk mendapatkan makna dari keseluruhan studi yang dilakukan. Untuk menghindari bias dari peneliti, maka setelah data dianalisis dan ditampilkan, maka dilakukan triangulasi data dengan cara melakukan perbandingan hasil temuan dengan studi-studi literatur yang sudah ada sebelumnya atau studi-studi literatur terkini.

HASIL

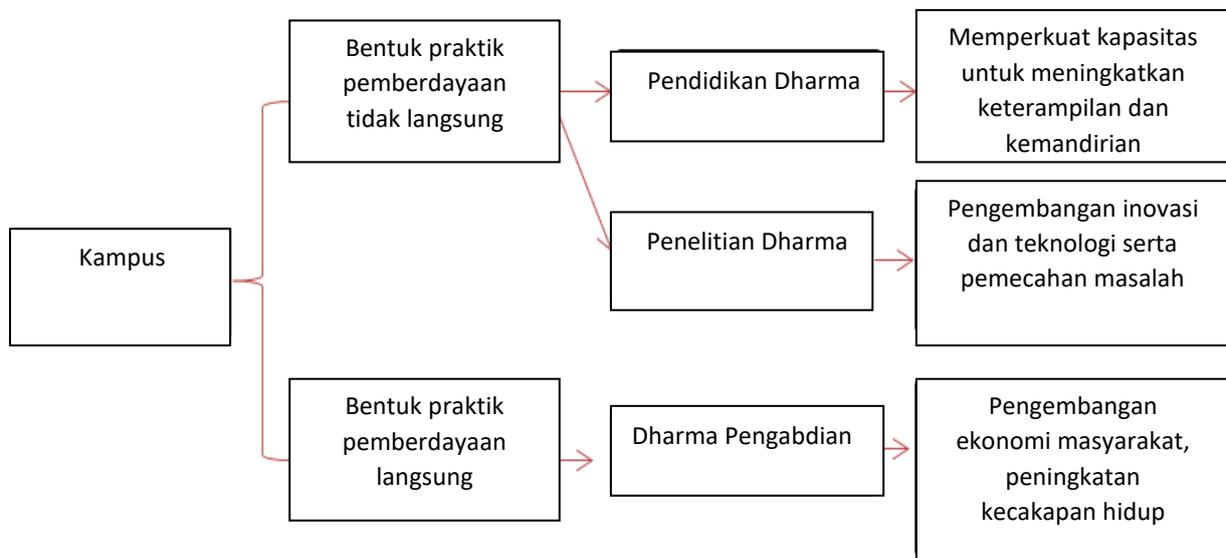
Peran Universitas Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Universitas telah menjadi salah satu pemain utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan universitas pun dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, peran universitas pun ditambah dengan adanya *entrepreneurial university* yang mendorong agar universitas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengoptimalkan sumber daya internal serta dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi dan bermanfaat baik untuk universitas itu sendiri dan masyarakat.

Dua faktor yang mendorong keterlibatan Universitas dalam praktik pelibatan masyarakat: “(a) sebagian besar tujuan akademik dapat dicapai dengan baik melalui kerjasama dan kemitraan lokal dan regional untuk membangun dan berbagi pengetahuan, dan (b) universitas memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penguatan modal manusia, pengetahuan yang tersebar, dan kewarganegaraan aktif” (Vargiu, 2014). Mengenai kemungkinan kontribusi universitas, Shiel (2016) dalam Bellandi (2021:3) berpendapat bahwa “Universitas dapat memajukan co-creation of community change dengan berkontribusi dengan penelitian, keterampilan teknis, sumber daya manusia, dan pengetahuan yang muncul”.



Merujuk pada Tridharma Perguruan Tinggi, dharma pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung. Dimana dalam dharma ini, individu-individu yang memasuki proses pendidikan tinggi di Universitas akan mendapatkan transfer pengetahuan, penguatan keterampilan dan peningkatan pengalaman berdasarkan praktik pengetahuan. Sehingga melalui proses pendidikan ini akan lahir individu-individu yang berkualitas, mandiri dan memiliki keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja. Proses inilah yang disebut dengan praktik pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kapabilitas masyarakat (Mulyawan, 2016).



Gambar 3. Peran Universitas dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat
 Sumber: Penulis dengan mengolah dari berbagai sumber

Ketiga peran universitas sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Peran pemberdayaan tak langsung meliputi pendidikan dan penelitian. Pendidikan dilakukan dengan memperkuat kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian, sementara penelitian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta pemecahan masalah. Bentuk pemberdayaan secara langsung, yaitu pengabdian masyarakat dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dan, peningkatan kecakapan hidup. Artinya, Tri Dharma Perguruan Tinggi pun pada hakikatnya merupakan elemen utuh dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam konteks studi ini. Dalam hal ini ekonomi masyarakat desa terwakili oleh UMKM dan BUMDesa.

Beberapa contoh yang dilakukan oleh universitas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat saat ini memang sebagian besar ditujukan kepada pengembangan UMKM. Misalnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) di era pandemi covid-19 memberikan perhatian besar kepada aspek pendidikan terhadap UMKM, penelitian kepada UMKM dan persoalannya, serta memberikan langkah konkrit berupa perwujudan *platform online* kepada para pelaku UMKM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat eksis di tengah persoalan pandemi yang melanda hampir seluruh negara (Kopma-UGM, 2021).

Dalam konsep *entrepreneurial university*, peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat memang cenderung diaplikasikan kepada UMKM. Hal ini dicontohkan dari Universitas Padjajaran (Unpad) dari Indonesia dan Juga Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dari Malaysia bahwasanya peran universitas dalam mencetak para wirausahawan dan juga pen jembatan antara dunia usaha dan akademisi dapat dilakukan dengan memberikan praktik-praktik dasar pengelolaan UMKM baik di internal kampus maupun di eksternal kampus. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas terkait praktik-praktik wirausaha di skala kecil menengah (Unpad, 2013).

Peran universitas untuk mendukung BUMDesa masih sangat baru mengingat undang-undang desa baru disahkan ditahun 2014. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, di penjelasan Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”. Senada dengan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengungkapkan pentingnya dunia kampus untuk mendorong pembangunan di pedesaan yang melibatkan kemitraan antara kampus dan BUMDesa (Kemendesa, 2021).

Posisi Universitas Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa tidak terlepas dari posisi universitas dalam memainkan perannya. Bagi sebagian besar universitas di Indonesia saat ini, universitas adalah aktor utama yang memainkan seluruh peran dalam suatu adegan film. Studi-studi dari Bastalich (2010); Sakapurnama et al. (2019) & Sakapurnama et al. (2020), dengan mengusung konsep *entrepreneurial university*, selain juga Tri Dharma Perguruan Tinggi yang otomatis melekat di dalamnya, universitas seringkali menjalankan perannya baik sebagai posisi penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pendifusi iptek, pengaplikasi iptek ke masyarakat atau pasar, dan penerima manfaat dari iptek yang dihasilkan tersebut. Posisi universitas yang bisa dikatakan dari hulu ke hilir inipun mengacu pada bagaimana kemampuan sumber daya internal yang dimiliki oleh universitas tersebut. Maka wajar, jika beban dosen saat ini ialah semakin berat, tidak hanya sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdian, namun juga sebagai wirausahawan dan pencetak wirausahawan-wirausahawan baru.

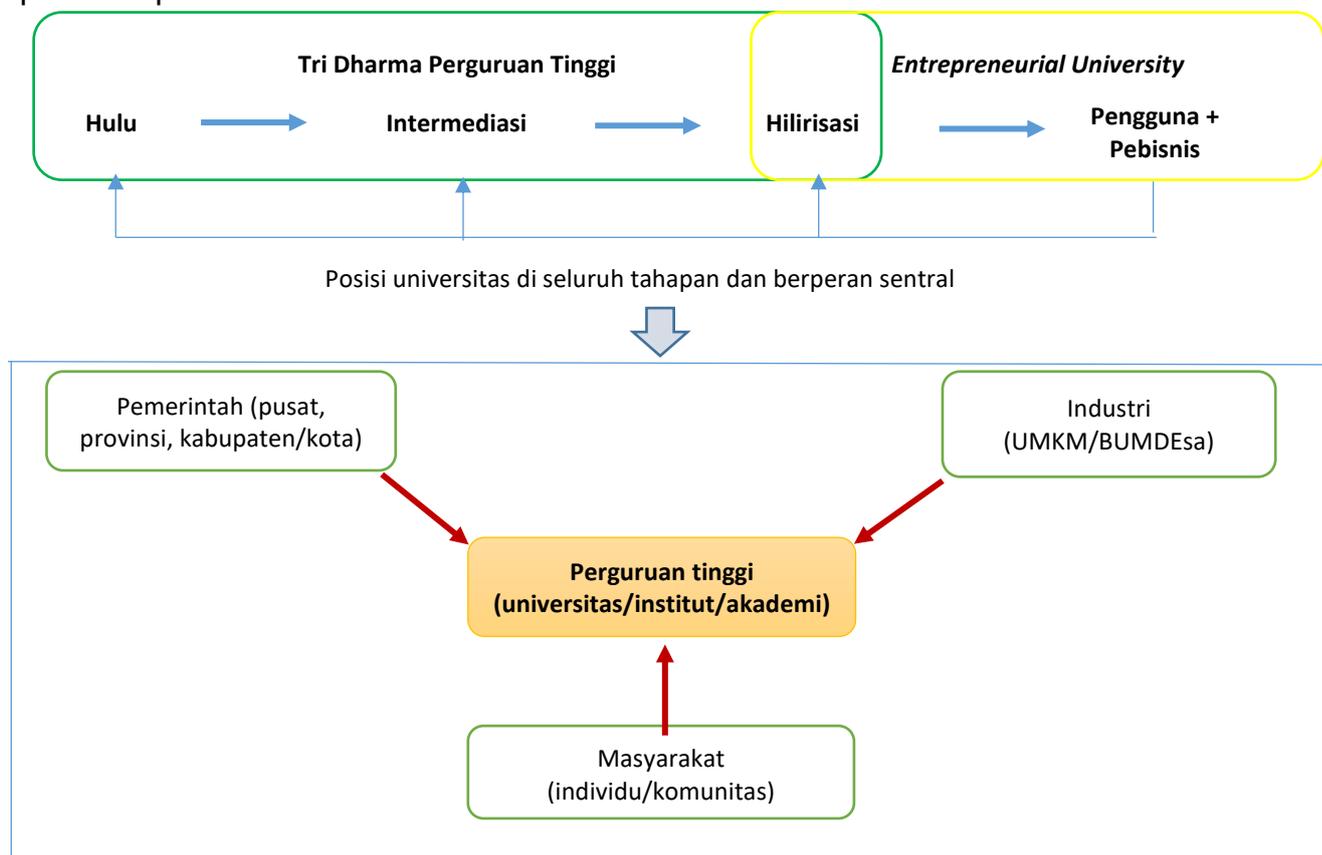
Begitu pun, posisi universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dilakukan dengan mengedepankan universitas sebagai lembaga penghasil iptek, penyalur iptek, dan pelaksana iptek. Hampir semua peran dilakukan oleh universitas untuk mendorong ketahanan ekonomi masyarakat di desa. Berbagai praktik yang ada, terkait dukungan universitas ke UMKM ataupun BUMDesa, universitas diminta untuk memberikan hasil pemikiran dan penelitian-pengembangan terkait UMKM dan BUMDesa seperti produksi, manajemen, pemasaran, organisasi keuangan, sistem penjualan dan pasar, sekaligus uji coba keberhasilan dari pemikiran dan penelitian-pengembangan tersebut langsung ke masyarakat/pasar. Bahkan, universitas seringkali diposisikan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan dari suatu program pengabdian masyarakat atau pelatihan masyarakat di bidang ekonomi¹.

Peran universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir terutama dalam mendukung UMKM dan BUMDesa tidak lepas dari semakin banyaknya amanah yang dititipkan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat kepada universitas. Sehingga universitas seringkali memposisikan sebagai lembaga multi talenta dalam menyelesaikan

¹ Hasil dari interpertasi penulis di lapangan yang berpengalaman sebagai mahasiswa, dosen, dan peneliti



persoalan-persoalan sosial-ekonomi di masyarakat. Posisi ini semakin sentral ketika universitas didukung oleh sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas riset, infrastruktur tanah dan bangunan, hingga diperbolehkannya universitas melakukan kegiatan bisnis dari hasil kegiatan internal dan jejaring eksternal kampus. Dampaknya, universitas sering menjadi tempat konsultasi dan praktik bagi masyarakat, industri, dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di level UMKM dan BUMDesa².



Gambar 4. Posisi Sentral Universitas diantara Industri-Pemerintah-Masyarakat
Sumber: Penulis dari temuan yang diinterpretasikan

Posisi universitas sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan bahwa peran sentral universitas terlihat dari proses hulu hingga hilir yang artinya bahwa universitas melakukan banyak peran dari mulai penyedia ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perantara iptek ke pengguna, sekaligus sebagai pengguna iptek itu sendiri. Bahkan adanya konsep *entrepreneurial university* mengharuskan universitas juga turut sebagai penggiat bisnis di dalam proses tersebut. Artinya, Tri Dharma Perguruan Tinggi pun telah memberikan aspek sangat luas bagi praktik-praktik ekonomi berbasis pengetahuan yang dipahami oleh universitas selama ini.

² Hasil dari interpertasi penulis di lapangan yang berpengalaman sebagai mahasiswa, dosen, dan peneliti

Tabel 1. Peran Setiap Aktor Dalam Tahapan Hilirisasi Iptek: Kondisi Saat Ini

Tahapan	Aktor	Peran	Deskripsi
Hulu Penghasil/penyedia riset dasar	Universitas	Sebagai lembaga penyedia atau penghasil riset dasar melalui aktivitas pendidikan dan litbang	Universitas bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas pendidikan dan penelitian dasar
Intermediasi Intermediasi hasil riset dasar ke pengembang	Universitas	Sebagai perantara yang membawa hasil penelitian ke lembaga pengembang hasil penelitian ke produk iptek terapan	Universitas bertanggung jawab untuk melakukan intermediasi antara hasil penelitian dasar ke pengembangan produk iptek terapan
Hilirisasi Hilirisasi hasil iptek ke pengguna	Universitas	Melakukan komersialisasi dari produk iptek terapan ke pengguna (industri atau masyarakat)	Bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan komersialisasi hasil litbang menjadi produk bernilai ekonomi
Pengguna & pebisnis 1. Pengguna/penerima manfaat iptek 2. Pelaku bisnis	1. Universitas, industri, masyarakat, pemerintah 2. Universitas dan industri	1. Menggunakan hasil litbang yang memiliki nilai tambah (sosial, ekonomi, lainnya) dan diterima sesuai nilai yang berlaku 2. Menjalankan aktivitas bisnis di berbagai sektor dan berbagai organisasi bisnis, minimal dalam bentuk kewirausahaan berbasis riset dan mencetak para wirausaha baru	1. Menjadi pengguna hasil iptek yang sudah terkomersialisasikan di pasar 2. Menjadi pelaku bisnis serta bertanggung jawab untuk mencetak wirausahawan-wirausahawan muda/baru



		(mahasiswa calon pengusaha)	
--	--	-----------------------------	--

Sumber: Penulis dari temuan yang diinterpretasikan

Tabel di atas menjelaskan bahwasanya peran universitas sangat sentral di setiap tahapan dalam menghasilkan *knowledge-based economy (KBE)*. Posisi ini memberikan arti bahwa universitas bisa berperan di tahapan manapun, mulai dari aktivitas penelitian dasar hingga bagaimana penelitian itu bernilai ekonomi. Tri Dharma Perguruan Tinggi ditunjukkan dengan adanya aktivitas hilirisasi hasil riset ke pengguna. Sebagai *entrepreneurial university*, universitas juga kemudian dapat menjadi tempat bagi lahirnya pengusaha-pengusaha baru dan muda yang merupakan kombinasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan baik oleh universitas maupun industri (Sakapurnama et al., 2019). Tentu ini kemudian akan melahirkan inovator-inovator baru dan *fresh* yang berasal dari kampus.

Posisi universitas dalam menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa saat ini, tidak terlepas dari posisi universitas dalam melakukan aktivitasnya baik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun *entrepreneurial university*. Posisi yang sentral dengan memainkan peran juga berdampak pada luasnya bidang cakupan yang dilakukan oleh universitas. Posisi ini merupakan bentuk tradisional dari interaksi *quadruple helix* yang menempatkan universitas sebagai posisi sentral dengan memanfaatkan sumber informasi dan pengetahuan dari jejaring eksternal (Nordberg et al., 2020).

Kaitannya dengan penguatan UKM dan BUMDesa, sebagaimana bentuk representatif dari bentuk usaha masyarakat di desa, keduanya dapat menggiring kepada peningkatan pendapatan masyarakat desa yang kemudian juga berdampak pada pertumbuhan/pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh. Hal ini tentu juga menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar dan banyak bagi universitas, belum lagi sumber daya yang dimiliki mulai dari personil, anggaran, infrastruktur, jejaring, fasilitas harus mendukung universitas tersebut. Maka tak heran, jika beberapa kontribusi universitas kurang dikenal gaungnya atau minim kontribusinya dalam menguatkan perekonomian masyarakat desa dikarenakan dukungan sumber daya internal dan jejaring eksternal yang sangat terbatas.

Struktur universitas yang fleksibel sangat memungkinkan untuk melakukan berbagai aktivitas baik untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi dari sumber daya yang ada demi pemajuan ilmu pengetahuan dasar. Bahkan universitas pun dapat bekerjasama dengan jejaring eksternal, seperti pemangku kepentingan, misalnya masyarakat untuk menyelaraskan antara upaya komersialisasi litbang yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat (Markman et al. 2008). Namun demikian, hal tersebut tidak mudah dicapai karena faktor-faktor internal individu dan organisasi yang seringkali tidak mendukungnya (McAdam et al., 2018).

Saat ini kontribusi universitas ke desa, masih didominasi oleh praktik kuliah kerja nyata (KKN) yang merupakan bentuk pengabdian masyarakat secara langsung, dimana berbagai literatur dan fakta menunjukkan bahwasanya KKN menjadi perwujudan konkrit dunia akademisi kepada masyarakat secara langsung. Namun demikian, peran universitas dalam mendorong ekonomi masyarakat baik melalui UMKM dan BUMDesa sangat terbatas. Persoalan administrasi ekonomi, dan tata Kelola pemerintahan desa masih menjadi soal. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi mengarahkan suatu konsep

“Kampus Membangun Desa”, yang bisa diartikan Kampus Masuk Desa dan Desa Masuk Kampus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk inovasi yang terjadi di desa. Bahkan program ini ditujukan untuk seluruh perangkat desa, kepala desa, dan pengurus BUMDesa. Kampus dapat menjadi tempat sumber pengetahuan, lembaga pendidikan, dan juga pendorong ekonomi di desa (Kemendesa, 2021). Sehingga bentuk pengabdian masyarakat secara tidak langsung seperti pendidikan dan penelitian juga dapat diterapkan dalam menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

DISKUSI

Reposisi Peran Universitas dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Perspektif *Quadruple Helix*

Perkembangan industri 4.0 telah membawa pemahaman baru betapa pentingnya keterlibatan universitas, industri, dan pemerintah sebagai bentuk kolaborasi bersama untuk melahirkan berbagai inovasi dalam mendukung perekonomian nasional. Universitas pun dituntut untuk lebih mendekatkan dirinya ke industri, dan sebagaimana industri yang juga dituntut untuk lebih mendekatkan dirinya ke universitas yang bertujuan untuk merealisasikan apa yang disebut dengan ekonomi berbasis pengetahuan (Diana & Hakim, 2020). Hal ini tentu saja juga berdampak pada masyarakat sebagai pengguna sekaligus mitra dari aktivitas tersebut, begitu pula dengan pemerintah yang menjadi fasilitator atau regulator untuk mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini kemudian dikemukakan oleh Arnkil et al., (2010); Nordberg et al., (2020); & Lattu, (2022) sebagai konsep *quadruple helix* dimana jejaring antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat menjadi prasyarat untuk mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan tersebut.

Quadruple helix telah membuka jalan antara universitas dengan jejaring eksternal seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan inovasi. Melalui jejaring ini, peran universitas akan terlihat secara jelas sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Misalnya aktivitas pelatihan kepada masyarakat, transfer pengetahuan dan teknologi ke masyarakat, berbagai bentuk difusi pengetahuan atau hasil penelitian yang memiliki dampak luas kepada pihak-pihak tersebut (Natario, 2017).

Quadruple helix telah membuka akses pada bentuk inovasi terbuka, artinya universitas bukanlah entitas tertutup dalam melakukan inovasi, melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain, terutama dalam melakukan aktivitas *entrepreneurial university*. Universitas tidak berhenti pada aspek pengajaran, pelatihan, riset, penciptaan pengetahuan, dan transfer teknologi, melainkan juga aktivitas-aktivitas kewirausahaan dan komersialisasi hasil litbang (Bastalich, 2010; Abreu & Grinevich, 2013), baik secara komersial formal (paten, lisensi), komersial informal (konsultasi dan penelitian dengan kontrak tertentu, dan non komersial non-formal (konferensi publik) (Abreu & Grinevich, 2013).

Tabel 2. Peran Setiap Aktor Dalam Mendorong Inovasi: Kondisi Seharusnya

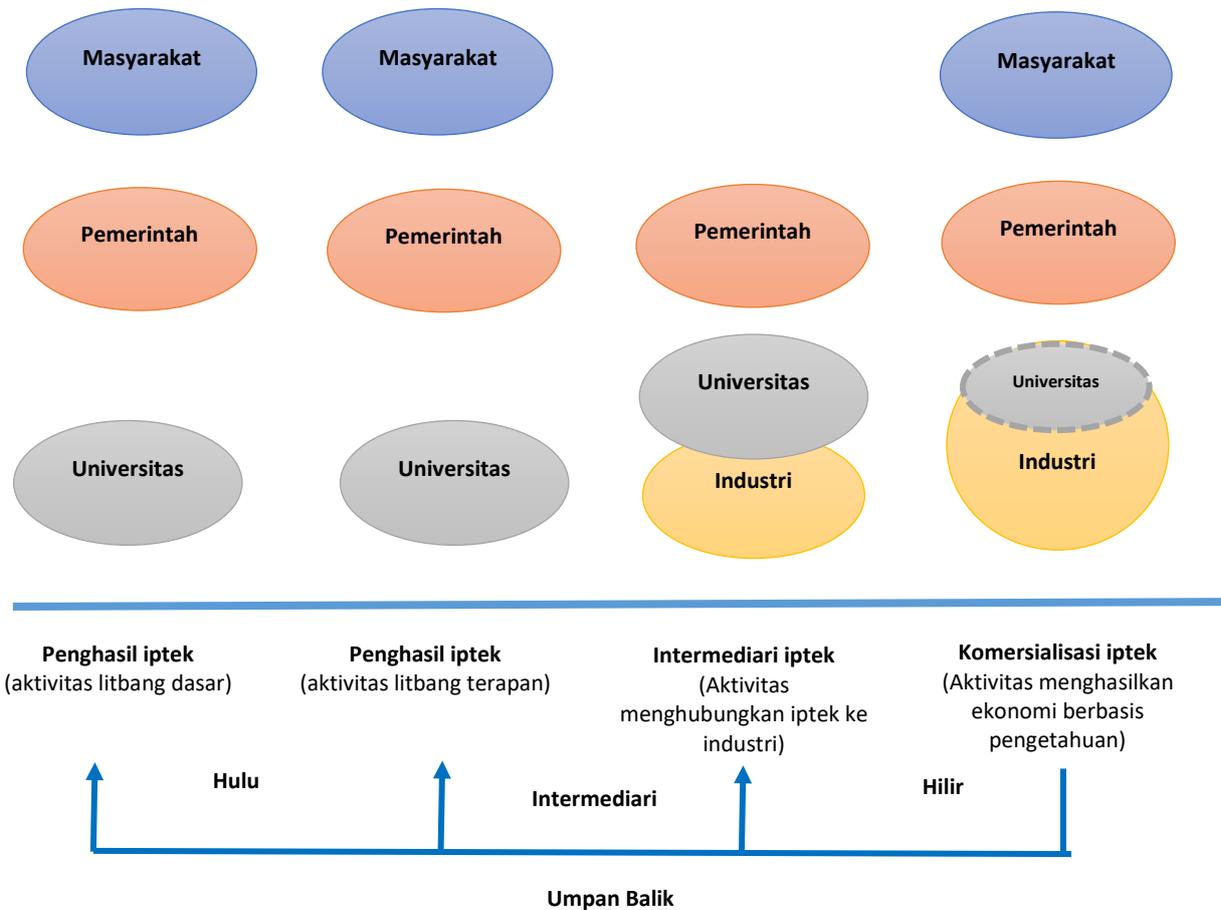
Tahapan	Penghasil ilmu pengetahuan	Pengembangan teknologi dan/atau produk baru (prototipe awal)	Upaya mendorong inovasi		Menentukan tujuan sosial-ekonomi
			Pemasaran dan validasi teknologi	Komersialisasi dan scaling up	



Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas 2. Lembaga litbang publik 3. Lembaga litbang di perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas (dengan <i>spin off</i>) 2. Lembaga litbang (dengan <i>spin off</i>) publik 3. Perusahaan besar (dengan <i>spin off</i>) 4. UMKM 	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1) UMKM dengan dukungan modal ventura, dana pemerintah, dana hasil royalti 2) Perusahaan besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Masyarakat/komunitas
Contoh dukungan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan ilmu pengetahuan 2. Kebijakan penelitian 3. Kebijakan pendidikan tinggi 	Kebijakan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan industri 2. Kebijakan inovasi 	Agenda sosial-ekonomi nasional	

Sumber: Mohammed (2021) dengan penyesuaian

Quadruple helix merupakan jejaring interaksi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat. Meskipun mereka berinteraksi, namun pembagian peran antara aktor satu dengan yang lain cukup jelas. Berdasar tabel di atas, peran utama universitas bersama lembaga litbang ialah di sisi hulu dan intermediari. Di sisi hulu sebagai pelaksana aktivitas litbang, terutama penelitian-penelitian dasar yang berujung pada publikasi, dan di sisi intermediari bersama dengan industri melakukan pengembangan produk-produk litbang siap pakai (biasanya berupa prototipe atau model rekayasa teknologi). Sementara itu, upaya komersialisasi produk-produk litbang merupakan ranah dari industri, baik industri skala besar, skala menengah, maupun skala kecil seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Begitu pula, industri perlu dukungan dari kebijakan pemerintah serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi yang dihasilkan dari aktivitas litbang.



Gambar 5. Peran Universitas dalam Tahapan Komersialisasi Hasil Litbang
 Sumber: Hasil interpretasi penulis dari Mohammed (2021)

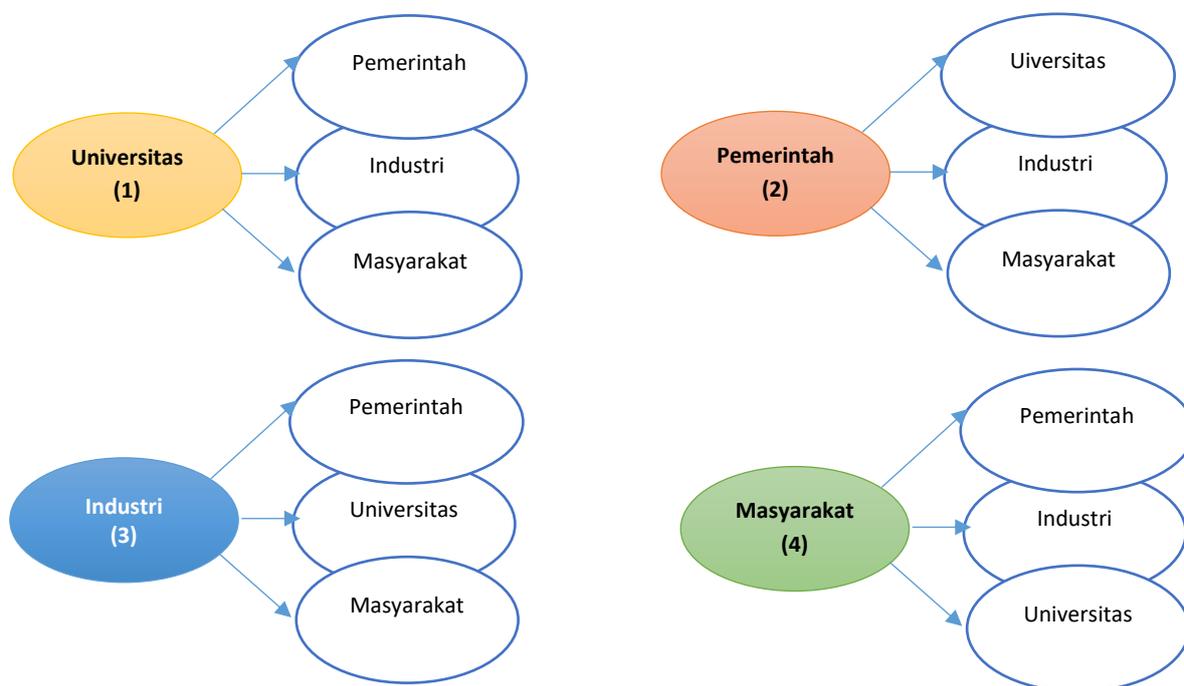
Gambar di atas menjelaskan bahwa universitas memiliki peran yang sebagian besar ada di sisi hulu daripada di sisi hilir. Bahkan di sisi intermediari pun peran universitas sudah harus diimbangi oleh peran industri. Sementara di sisi hilir, peran industri harus lebih besar daripada universitas. Bahkan peran industri sendiri pun bisa berjalan tanpa ada universitas sebagai mitra di sisi hilir. Sementara itu, peran pemerintah sebaiknya ada mulai level hulu, intermediari, hingga hilir. Dan peran partisipasi masyarakat hadir di hulu dan hilir mengingat kebutuhan masyarakat ada di bagian hilir secara praktis, dan ditentukan di bagian hulu secara gagasan. Artinya, posisi universitas sudah harus ditempatkan pada domain yang sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya internal dan jejaring eksternal termasuk jejaring bisnisnya. Industrilah yang merespon apa yang dilakukan oleh universitas, sementara pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan tujuan dari sosial-ekonomi suatu negara yang kemudian secara operasional dijalankan oleh universitas dan industri.

McAdam et al (2018) & Morawska-Jancelewicz (2021) mengungkapkan bahwa universitas harus bisa menentukan ukuran-ukuran dan tujuannya dengan pemangku kepentingan, karena dalam konteks ini pemerintah dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang menentukan arah dan tujuan dari pemanfaatan produk-produk litbang baik secara sosial maupun ekonomi. Pemangku kepentingan disini merupakan mereka yang akan mengarahkan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh universitas. Artinya, universitas harus dapat

membuka jejaring dengan masyarakat dan pemerintah karena hasil akhir yang akan menerima dan menggunakan produk-produk universitas ialah lingkungan internal dan eksternal.

Dalam *quadruple helix*, peran universitas tidaklah lebih dominan dari ketiga pihak lainnya yaitu, industri, pemerintah, dan masyarakat. Namun memiliki peran yang sejajar atau berbagi peran di masing-masing pihak. Karena itu, posisi universitas tidaklah sentral dalam jejaring tersebut, melainkan saling melengkapi. Dalam pengertian ini, universitas sebaiknya dapat membatasi peran terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya internal mereka, termasuk kondisi eksternal yang mempengaruhinya. Untuk melakukan inovasi misalnya, universitas tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan melibatkan pihak-pihak lain, minimal industri.

Universitas bisa menggandeng industri sebagai mitra bisnis, universitas bisa membentuk unit bisnis/industri baru (konsep *entrepreneurial university*) atau pun universitas tetap hanya sebagai produk litbang, dan menyerahkan aspek komersialisasi ke industri. Dukungan pemerintah dan masyarakat harus ada di bentuk-bentuk kerjasama universitas dan industri tersebut (World Bank, 2010; Kuhlmann et al., 2010; Asmara and Kusumastuti, 2021). Karena itu, sudah saatnya bagi universitas untuk mengubah cara kerja yang biasanya hanya terpaku pada dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dapat bertransformasi menjadi wirausaha berbasis pendidikan, wirausaha berbasis penelitian, dan wirausaha berbasis pengabdian masyarakat. Artinya, pihak industri dan masyarakat sudah menjadi bagian dari mitra universitas yang dilibatkan sejak awal dalam menjalankan fungsi *entrepreneurial university*.



Gambar 6. Posisi Universitas dalam Mewujudkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
Sumber: Dikembangkan dari Arnkil et al., (2010) & Nordberg et al. (2020)

Gambar di atas menjelaskan bahwa peran universitas tidak perlu menjadi sentral, namun bisa menjadi bagian dari aktor-aktor lain dalam mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan atau inovasi. Meskipun universitas menjadi “lead” untuk aktor-aktor lainnya (*chart* nomor 1), bukan berarti universitas yang menjadi aktor tunggal dan utama, namun tetap melibatkan peran aktor lain sebagai mitra utamanya. Universitas dapat memanfaatkan pengetahuan dari pihak eksternal atau dari ketiga aktor tersebut untuk membantu pekerjaan universitas. Begitu pula berlaku bagi pemerintah (*chart* nomor 2) sebagai “lead” yang harus memfasilitasi dan mengkoordinasikan elemen-elemen industri, masyarakat, dan universitas dalam penciptaan iklim yang kondusif dalam berinovasi. Industri (*chart* nomor 3) sebagai “lead” yang menentukan tujuan ekonomi dengan mengarahkan pemerintah, universitas, dan masyarakat agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri. Terakhir, masyarakat (*chart* nomor 4) sebagai “lead”, bahwasanya industri, pemerintah, dan universitas dapat memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat melalui aktivitas inovasi atau ekonomi berbasis pengetahuan.

Quadruple helix pun mengarahkan reposisi peran universitas guna meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini ekonomi di wilayah pedesaan. [Bonfiglio, et al., \(2017\)](#) mengemukakan bahwa pengembangan desa saat ini telah identifikasi dengan pembangunan sosial-ekonomi yang juga masih dibatasi oleh akses yang terbatas secara wilayah, karena itu alokasi pendanaan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan berbagai bentuk inovasi yang dihasilkan. [Ní Fhlatharta and Farrell \(2017\)](#) menambahkan bahwa perlu jejaring yang menghubungkan antar aktor untuk mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi di desa. Semenjak dikeluarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi pendanaan level desa diberi perhatian oleh pemerintah pusat, jejaring antar desa dengan pihak lainnya pun diperluas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Kaitannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa di bidang pangan misalnya, peran universitas dapat memaksimalkan potensi di aktivitas litbang dengan melakukan pengujian akan kualitas produksi atau produk yang dihasilkan oleh UMKM secara awal. Namun demikian pengujian produk makanan berkualitas internasional tetap harus melibatkan Sucofindo selaku penguji terstandar kualitas makanan di Indonesia. Bentuk lainnya, hasil litbang universitas dapat dimanfaatkan sekaligus diuji coba kepada UMKM. Karena tidak mungkin bagi UKM untuk melakukan aktivitas litbang dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas yang tidak memadai. Universitas dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan skala besar. Bisnis pertanian dan pangan Indonesia mengandalkan institusi pendidikan dalam hal kemajuan teknologi, inovasi serta penelitian dan pengembangan. Mereka berpartisipasi sebagai fasilitator dan sumber informasi untuk proyek ([Dhewanto, 2021](#)).

KESIMPULAN

Universitas telah menjadi salah satu pemain utama selain industri, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan perekonomian masyarakat desa, terutama di era pasca pandemic covid-19. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga *entrepreneurial university* telah menjadikan peran universitas semakin luas, atau bisa dikata semakin kompleks, tidak hanya sebagai produsen iptek, melainkan juga sebagai perantara hasil litbang ke industri, dan bisa juga berperan dalam mengkomersialisasikan hasil litbang ke pengguna. Hal ini tentunya menjadikan posisi universitas sentral di antara aktor lainnya. Namun demikian, keterbatasan sumber daya



internal universitas dan jejaring eksternal universitas menjadikan universitas kurang terdengar gaungnya kaitannya dengan kontribusi universitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa, terutama bagi pelaku UMKM dan BUMDesa.

Kerangka *quadruple helix* telah memberikan pedoman konseptual bagi universitas dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga *entrepreneurial university* agar universitas dapat memaksimalkan sumber daya internal dan jejaring eksternal agar perannya tidak terlalu luas dan dominan diantara aktor-aktor yang lain. Reposisi peran universitas diperlukan guna memperkuat posisi universitas diantara industri, pemerintah, dan masyarakat, terutama kaitannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Hal ini berdampak pada 2 (dua) hal yaitu, 1) kejelasan peran universitas dalam menjalankan perannya untuk memperkuat perekonomian di suatu wilayah, dan 2) menunjukkan kontribusi nyata universitas ke sektor ekonomi, dalam hal ini ke pelaku UMKM dan BUMDesa.

Studi ini menyarankan bahwa universitas sebaiknya berada di dalam ranah penghasil iptek melalui aktivitas pendidikan dan litbang di sisi hulu, jika tidak memiliki jejaring eksternal dengan dunia industri dan masyarakat. Bagi universitas yang memiliki jejaring eksternal dengan industri dan masyarakat, aktivitas hilirisasi hasil litbang bisa dilakukan asalkan ada kesepakatan diantara universitas, industri, dan masyarakat terkait peran yang dimainkan dan kontribusinya di setiap aktor. Tentunya, pemerintah baik pusat dan/ataupun daerah dapat menjadi fasilitator dan regulator terkait interaksi yang dilakukan oleh universitas, industri, dan masyarakat. Kaitannya dengan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat desa, UMKM dan BUMDesa sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai pengguna dari produk litbang di bagian hilir semata, namun sebagai mitra bagi universitas di bagian hulu. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota, industri skala besar di lingkungan sekitar, dan masyarakat dapat turut andil dalam mendukung lingkungan ekonomi berbasis pengetahuan di level desa.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan diantara penulis dan juga pemberi dana

DAFTAR REFERENSI

- Abreu, M. & Grinevich, V. "The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities." *Research Policy* vol. 42, no. 2 (2013): 408–422.
- Adawiyah, Veni Robiatal. "Collaborative Governance Program Beli Kreatif Lokal di Jabodetabek". Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi-Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Indonesia. 2022.
- Alamsyah, M. Nur. "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia". *Jurnal ACADEMICA Fisp Untad* Vol, 03, No 02 (2011): 647-660.
- Arnkil, R.; Järvensivu, A.; Koski, P.; & Piirainen, T. "Exploring Quadruple Helix. Outlining User Oriented Innovation Models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project of Financed by European Regional Development Fund Made possible by the INTERREG IVC Programme." 2010.

- Arranz, N.; Arroyabe, M. F.; & Schumann, M. "The Role of NPOs and International Actors in the National Innovation System: A Network-Based Approach." *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 159 (2020).
- Asmara, Anugerah Yuka & Kusumastuti, Retno. "Innovation Policy Implementation in Indonesia: Perspective of Triple Helix". *Journal of STI Policy and Management Vol 6 (1) (2021): 1-19.*
- Badaruddin. "Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera." *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 2020.
- Bastalich, W. "Knowledge Economy and Research Innovation." *Studies in Higher Education* vol. 35, no. 7 (2010): 845–857.
- Bellandi, M.; Donati, L.; & Cataneo, A. "Social innovation governance and the role of universities: Cases of quadruple helix partnerships in Italy." *Technological Forecasting and Social Change* vol. 164 (March, 2021). doi: 10.1016/j.techfore.2020.120518.
- Bonfiglio, A.; Camaioni, B.; Coderoni, S.; Esposti, R.; Pagliacci, F.; and Sotte, F. "Are Rural Regions Prioritizing Knowledge Transfer and Innovation? Evidence from Rural Development Policy Expenditure Across the EU Space." *Journal of Rural Studies* Vol 53: (2017): 78-87.
- Cai, Y. & Lattu, A. "Triple Helix or Quadruple Helix: Which Model of Innovation to Choose for Empirical Studies?" *Minerva* vol. 60 no. 2 (2022): 257–280. doi: 10.1007/s11024-021-09453-6.
- Damsar & Indrayani. "Pengantar Sosiologi Pedesaan". Jakarta: Kencana, 2016.
- Dhewanto, W.; Herliana, S.; Yunita, F.; Nur Rizqi, V. & Williamson, I. O. "Quadruple Helix Approach to Achieve International Product Quality for Indonesian Food SMEs." *Journal of the Knowledge Economy* vol. 12, no. 2 (June, 2021): pp. 452–469. doi: 10.1007/s13132-020-00644-2.
- Diana & Hakim, Luqman. "Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah : Tinjauan Konseptual Dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi". *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*. (2020). *Journal Homepage*: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/> ISSN: 2776-1177 (Media Online) *Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 2020 Universitas Muhammadiyah Jakarta 10-11 Desember 2020.*
- Dikti. "Jadikan Kampus Sebagai Kawah Candradimuka Untuk Mencetak Pengusaha-pengusaha Baru". 2021. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/jadikan-kampus-sebagai-kawah-candradimuka-untuk-mencetak-pengusaha-pengusaha-baru/> pada 16 Juli 2022.



- Dodgson, Mark. "Policies for Science, Technology, and Innovation in Asian Newly Industrializing Economies". In Kim, Linsu & Nelson, Richard R. (Eds), in *Technology, Learning, & Innovation* (2000): 229-268. Cambridge: Cambridge University Press.
- Etzkowitz, H. & Klofsten, M. "The innovating region: toward a theory of knowledgebased regional development." *R&D Management* vol. 35, no. 3 (2005): 243–255.
- FIA-UI. "Membangun Entrepreneurial University di Indonesia". 2020. Diakses dari <https://fia.ui.ac.id/membangun-entrepreneurial-university-di-indonesia/> pada 16 Juli 2022.
- García-González, A. & Ramírez-Montoya, M. S. "Higher Education for Social Entrepreneurship in The Quadruple Helix Framework: Co-Construction In Open Innovation." *TEEM* (2019): 925–929.
- Gilaninia, Roghayeh. "Village, Villagers and Rural Development". *Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies* Vol.3, No.6 (2015): 39-44.
- Junaedi, Dedi & Salistia, Faisal. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak". *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*: 995-1115.
- Kemendesa. "Gus Halim Kampus Berperan Penting Membangun Desa". 2021. Diakses dari <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3842/gus-halim-kampus-berperan-penting-membangun-des> pada tanggal 19 Juli 2022.
- Kolehmainen, J. et al. "Quadruple helix, innovation and the knowledge-based development: lessons from remote, rural and less-favoured regions." *Journal of the Knowledge Economy* vol. 7, no. 1 (2016): 23–42.
- Kopma-UGM. "Kontribusi Mahasiswa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan UMKM di Masa Pandemi". 2021. Diakses dari <https://kopma.ugm.ac.id/2021/08/18/kontribusi-mahasiswa-melalui-tri-dharma-perguruan-tinggi-dalam-mengembangkan-umkm-di-masa-pandemi/> pada tanggal 18 Juli 2022.
- Kuhlmann, S., Shapira, P., Smits, R. "Introduction: A Systemic Perspective: The Innovation Policy Dance", in Ruud E. S., Stefan, K. & Philip, S. (eds), *The Theory and Practice of Innovation Policy (An International Research Handbook)*, (2010): 1-24, Edward Elgar, Cheltenham-UK.
- Kuntadi, Iwa. "Pengembangan Entrepreneur University Universitas Pendidikan Indonesia". Tanpa Tahun. Diakses dari http://jurnal.upi.edu/file/Iwa_K.pdf pada 16 Juli 2022.
- Kusumastuti, Retno & Asmara, Anugerah Yuka. "Village Authority and Local Innovation to Accelerate Rural Development In Indonesia: Review of Indonesian Act Number 6/2014 And Law of Government Number 38/2017". *Proceeding The 9th International Conference of Rural Research and Planning Group* (2018): 165-174.

- Limanseto, Haryo. “Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi” Siaran PERS. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021, Jakarta, 28 April 2021. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi-pada-16-juli-2022>.
- Maleha, Nova Yanti; Saluza, Imelda; & Setiawan, Bagus. “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03) (2021): 1441-1448.
- Markman, G. D., Siegel, D. S. & Wright, M. “Research and Technology Commercialization.” *Journal of Management Studies* vol. 45 (2008): 1401–1423.
- McAdam, M.; Miller, K.; & McAdam, R. “Understanding Quadruple Helix Relationships of University Technology Commercialisation: A Micro-Level Approach.” *Studies in Higher Education* vol. 43, no. 6 (June, 2018): 1058–1073. doi: 10.1080/03075079.2016.1212328.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. “Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)”. Sage Publications, Inc, 1994.
- Mohamed, Zamri. “Module 3 STI Policy Review”. ISTIC-UTM Perdana Course 5-days Course “STI Policy for Socio-Economic Development (SPED)”. Held in 30 August-4 September 2021 by online zoom. UTM Perdana Centre of STI Policy. Kuala Lumpur, Malaysia (2021): 1-36.
- Morawska-Jancelewicz, J. “The Role of Universities in Social Innovation Within Quadruple/Quintuple Helix Model: Practical Implications from Polish Experience.” *Journal of the Knowledge Economy*, 2021. doi: 10.1007/s13132-021-00804-y.
- Mulyawan, R. “Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan”. Bandung: UNPAD Press, 2016.
- Natário, M. “Using a Triple Helix Approach to Examine Interactions and Dynamics of Innovation in Less-Favoured Regions: The Case of the Portuguese Polytechnic of Guarda.” *Industry and Higher Education* vol. 31, no. 6 (2017): 351–359.
- Ní Fhlatharta, Aoife M. and Farrell, Maura. “Unravelling the Strands of ‘Patriarchy’ in Rural Innovation: A Study of Female Innovators and Their Contribution to Rural Connemara”. *Journal of Rural Studies* Vol, 54 (2017):15-27.
- Nordberg, K.; Mariussen, Å.; & Virkkala, S. “Community-driven Social Innovation and Quadruple Helix Coordination in Rural Development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten.” *Journal of Rural Studies* vol. 79 (October, 2020): 157–168. doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.08.001.
- Nugroho, Yanuar. “Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi Konsep dan Implementasi di Indonesia”. Materi dipresentasikan pada acara Seri VI | STI Policy Lecture Series 2021 Ekosistem Inovasi di Inggris dan Indonesia. 2021. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ZHZvQnyNMCK>.



- OECD. "Globalization and Emerging Economies: Brazil Russia India Indonesia China and South Africa". Paris-France: OECD Publishing, 2008.
- OECD. "Regions and Innovation Policy, OECD Reviews of Regional Innovation, OECD Publishing", 2011. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264097803-en>.
- Perkmann, M. & Walsh, K. "University–Industry Relationships and Open Innovation: Towards a Research Agenda." *Int. J. Manag. Rev* vol. 9 (2007): 259–280.
- Rahman, Muhammad Adi; Kusuma, Ahmad Zuhdi Dwi; Fatah, Akhmad Ramadhan; & Arfyanto, Hafiz. "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Ketenagakerjaan". 2020. Policy Brief. Diakses dari <https://smeru.or.id/id/publication-id/mengantisipasi-potensi-dampak-krisis-akibat-pandemi-covid-19-terhadap-sektor-pada-16-juli-2022>.
- Sakapurnama, E. & Huseini, M. "[Building Entrepreneurial University: Case from HEI's in Indonesia](#)". *Universal Journal of Educational Research* 7 (12) (2019): 2747 – 2754.
- Sakapurnama, E., Huseini, M., & Soeling, P. D. "Reinventing higher education institution toward 4.0 industry era: Modelling entrepreneurial university in Indonesia". *Test Engineering and Management* 82 (1-2) (2020): 1509-1515.
- Sakapurnama, E; Huseini, M; Soeling, PD. "[The Challenges in Higher Education Institutions in Indonesia: Are We Entrepreneurial University Yet ?](#)". *Hasanuddin Economics and Business Review* 2 (3) (2019): 153-171.
- Salah, A & Mujahiddin. "Tantangan dan Peluang Praktik Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Penguatan Peran Perguruan Tinggi." *BIRCI-Journal* vol. 3, no. 2 (2020): 1105–1113.
- Schieffer, A. & Ronnie, L. "The Integral University: Holistic development of individuals, communities, organisations and societies." *Prospects (Paris)* vol. 44 (2014): 607–626.
- Striukova, L. & Rayna, T. "University-Industry Knowledge Exchange: An Exploratory Study of Open Innovation in UK Universities." *Eur. J. Innov. Management* vol. 18 (2015): 471–492.
- Unpad. "Kampus Jangan Sekadar Jadi Research University Tapi Juga Entrepreneurial University". 2013. Diakses dari <https://www.unpad.ac.id/2013/11/kampus-jangan-sekadar-jadi-research-university-tapi-juga-entrepreneurial-university/> pada tanggal 18 Juli 2022.
- Vargiu, A. "Indicators for the evaluation of public engagement of higher education institutions." *Journal of the Knowledge Economy* vol. 5, no. 3 (2014): 562–584.
- World Bank. "Innovation Policy: A guide for Developing Countries". Washington DC; World Bank Publishing. 2010.

Wu, Jie; Zhuo, Shuaihe; and Wu, Zefu. "National Innovation System, Social Entrepreneurship, and Rural Economic Growth in China". *Technological Forecasting & Social Change* Vol 121 (2017): 238–250.

Xu, Guannan; Wu, Yuchen; Minshall, Tim; Zhou, Yuan. "Exploring Innovation Ecosystems Across Science, Technology, and Business: A Case of 3D Printing in China". *Technological Forecasting & Social Change* 136 (2018): 208–221.

Yun, J. H. J. & Liu, Z.. "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix model." *Sustainability (Switzerland)* vol. 11, no. 12 (2019). doi: 10.3390/SU11123301.



Halaman ini sengaja dikosongkan

